

PAJAK DAN RETRIBUSI

PERDA NO.8, LD 8/NO.154, 183 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110

Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 yaitu:
 1. Pasal 1 Ketentuan Umum
 2. Pasal 2 APBD Terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 3 APBD Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.
 4. Pasal 4 Rincian sumber Pendapatan Asli Daerah dan Rincian Pendapatan Transfer.
 5. Pasal 5 Rincian Anggaran Belanja Daerah.
 6. Pasal 6 Rincian Belanja Operasional dan Rincian Belanja Modal.
 7. Pasal 7 Anggaran Pembiayaan Daerah.
 8. Pasal 8 Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
 9. Pasal 9 Dalam Hal Keadaan Darurat.
 10. Pasal 10 Uraian lebih lanjut dalam Lampiran I sampai dengan Uraian XVI.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025.
- Lamp. :-